

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023

Jalan Aki Balak RT 08 Kel. Karang Harapan,
Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Telp/Fax : (0551) 3826321
Email. Psdkp.tarakan@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SKDP Tarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Tarakan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tarakan, Januari 2024
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan,



Johannis Johniforus Medea, S.St.Pi
NIP. 19850701 200901 1 002

()

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
i Daftar Isi	
ii Dafta	
iii Daftar Isi	ii
iv Pernyataan Tanggung Jawab	iii
1 Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	54
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
F. Pengungkapan Penting Lainnya	66
VI. Lampiran dan Daftar	

STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN
*JL Aki Balak RT 08, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan
Barat Kota Tarakan – Kalimantan Utara*
TELEPON (0551) 3826321, FAXIMILE (0551) 3826321

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tarakan, Januari 2024
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan,



Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi
NIP. 19850701 200901 1 002

()

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Tarakan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.088.510.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 25.583.370.144,- atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp 25.680.302.000.,

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 21,965,127,644,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 67,242,025; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 21,897,885,619; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 14,922,146 dan Rp 21,950,205,498.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 21.529.007.522,- sehingga terdapat Defisit

dari Kegiatan Operasional senilai Rp (21,540,780,158),-. Defisit dari Kegiatan Non

Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp (21,541,503,500),-.dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 0,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 17.904.465.557,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp -21,540,780,158,- kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0, Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0, Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,- serta koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp 5.485.840 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 25.581.034.259,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 21,950,205,498,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	820.000.000	3.088.510	0,38	64.884.055
JUMLAH PENDAPATAN		820.000.000	3.088.510	0,38	64.884.055
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	5.188.236.000	5.147.744.120	99,22	4.723.749.622
Belanja Barang	B.4	15.438.563.000	15.383.677.651	99,64	9.759.605.916
Belanja Modal	B.5	5.053.503.000	5.051.948.373	99,97	549.519.151
Belanja Bantuan Sosial	B.6			-	
JUMLAH BELANJA		25.680.302.000	25.583.370.144	99,62	15.032.874.689

II. NERACA

STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	67.237.025	331.964.523
Jumlah Aset Lancar		67.237.025	331.964.523
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	4.070.616.000	4.070.616.000
Peralatan dan Mesin	C.15	23.577.689.333	18.723.345.610
Gedung dan Bangunan	C.16	10.599.904.600	10.599.904.600
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	906.462.570	814.962.495
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	176.632.575	76.641.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(17.433.419.459)	(16.697.178.136)
Jumlah Aset Tetap		21.897.885.619	17.588.291.569
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	14.917.146	15.790.535
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	15.790.535
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.917.146	15.790.535
JUMLAH KEWAJIBAN			
		14.917.146	15.790.535
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	21,950,205,498	17.904.465.557
JUMLAH EKUITAS		21,950,205,498	17.904.465.557
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21,965,127,644	17.920.256.092

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		3.088.510	54.422.500
JUMLAH PENDAPATAN		3.088.510	54.422.500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.147.744.120	4.723.749.622
Beban Persediaan	D.3	224.953.120	260.721.539
Beban Barang dan Jasa	D.4	8.767.903.737	6.050.455.615
Beban Barang Pemeliharaan	D.5	3.383.978.710	1.829.582.308
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.270.696.193	1.559.922.464
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.156.201.960	1.761.066.912
JUMLAH BEBAN		22.951.477.840	16.185.498.460
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(22.948.389.330)	(16.131.075.960)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	9.185.805
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar		-	9.225.555
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	39.750
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1.236.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1.236.000
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	10.421.805
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(22.948.389.330)	(16.120.654.155)
SURPLUS/DEFISIT LO		(22.948.389.330)	(16.120.654.155)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	17.904.465.557	18.730.692.789
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	- 22.948.389.330	-16.120.654.155
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	5.485.840	130.718.489
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1	-	130.628.489
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	-	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	-	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	5.485.840	90.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3.5	25.581.034.259	15.163.708.434
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.3.6	2.638.130.769	-826.227.232
EKUITAS AKHIR	E.4	20.542.596.326	17.904.465.557

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi

Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Tarakan berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.

UPT Stasiun PSDKP Tarakan melalui SK Keputusan Direktur Jenderal PSDK No.10/KEP-DJPSDKP/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penempatan Kapal Pengawas Perikanan Dirjen PSDKP di UPT terdapat 1 unit kapal pengawas yaitu KP. Hiu 07. *Speedboat* yang terdapat pada Stasiun PSDKP Tarakan berjumlah 6 unit yaitu Dolpin 017, Marlin 05, Marlin 07, dan *Searider* RIB 03, RIB 09 dan *Speedboat* Albacore 03.

Jumlah pegawai negeri sipil Stasiun PSDKP Tarakan sebanyak 48 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 18 orang, Golongan III sebanyak 23 orang dan PPPK sebanyak 10 Orang, Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dialokasikan untuk 48 pegawai dengan rincian pegawai sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS dan PPPK	Pegawai Kontrak	PNS Dinas	Jumlah
1	Stasiun PSDKP Tarakan	34	18		47
2	Satwas PSDKP Nunukan	2	4		5
3	Wilker PSDKP Nunukan Utara	2	1		3
4	Wilker PSDKP Berau	1	0	1	2
5	Wilker PSDKP Bulungan	0	0		1
6	Wilker PSDKP Derawan	0	1		2
7	Satwas PSDKP Balikpapan	4	3		5
8	Wilker PSDKP Samarinda	0	0	1	1
9	Satwas PSDKP Kotabaru	2	0		2
10	Wilker PSDKP Batulicin	1	0	1	3

11	Wilker PSDKP Muara Kintap	0	0		0
12	Satwas PSDKP Banjarmasin	1	3		4
13	Wilker PSDKP Maratua	1	0		1
14	Wilker Bontang	0	0	1	1
Total		48	32	4	77

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Tarakan menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Tarakan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Tarakan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Berdasarkan surat Plh. Sekretaris Ditjen PSDKP nomer 14211/PSDKP.0.42/V/2019 tanggal 24 Mei

2019 perihal koreksi saldo persediaan BBM periode 31 Desember 2018 menindaklanjuti nota kesepakatan *Tripartied* antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI tanggal 25 April, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Kesepakatan *Tripartied*, disepakati bahwa untuk persediaan BBM Kapal Pengawas dikeluarkan dari Neraca Laporan Keuangan periode 31 Desember 2018 *Audited* tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk tingkat Eselon I dan masih menyajikan angka persediaan BBM dalam neraca.

Satker yang masih memiliki saldo BBM di awal tahun 2019 agar melakukan update aplikasi persediaan yang digunakan dengan versi 19 dan referensi 19 dan melakukan transaksi koreksi kurang pada aplikasi Persediaan dengan tanggal koreksi tanggal 4 Januari 2019, sesuai saldo BBM yang masih tersedia di awal tahun 2019.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu

sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

Program Prioritas Nasional

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output Strategis K/L dari masing-masing Prioritas Nasional adalah Sebagai Berikut;

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki beberapa output strategis berupa :
 - a) Satu Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP, yang dilaksanakan dengan

melakukan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat bersama dengan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur.

- b) Enam Puluh Tiga Hari Operasi Kapal Pengawas, yang dilaksanakan dengan melakukan gelar operasi Kapal Pengawas di WPPN RI 712 dan 713.
- c) Tiga Puluh Hari Operasi Speedboat Pengawas, yang dilaksanakan dengan melakukan gelar operasi Speedboat Pengawas di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, Satwas SDKP Nunukan, Satwas SDKP Balikpapan, Satwas SDKP Banjarmasin, dan Satwas SDKP Kotabaru.
- d) Satu Unit Speedboat Pengawas, yang dilaksanakan dengan melakukan pembangunan Speedboat Pengawas Albacore 03 bekerjasama dengan PT. Mutiara Fibrindo.
- e) Satu Unit Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun, yang dilaksanakan dengan membuat Master Plan pembangunan Pangkalan SDKP Kotabaru bekerjasama dengan PT. Paduraksa Konsultan.
- f) Tujuh Unit Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat, yang dilaksanakan dengan melakukan perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat terhadap Kapal Pengawas dan Speedboat pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.
- g) Sembilan Belas Lembaga Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya, yang dilaksanakan dengan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap pelaku usaha Sektor Kelautan.
- h) Empat Puluh Lembaga Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak yang dilaksanakan dengan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- i) Tiga Puluh Lima Lembaga Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya, yang dilaksanakan dengan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap pelaku usaha Sektor Perikanan.

Secara rinci output atas Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dapat kami sampaikan dalam tabel di bawah ini:

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	PN/ Tematik (PN xx/ T xx)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volumen Keluaran	Progres Capaian Output
1	QDD	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAS WAS) yang dibangun dalam membantu pengawasan SDKP	PN 06	Rp100.000.000	Rp96.715.152	96,72%	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100,00 %
2	QHD	Operasi Kapal Pengawas	PN 07	Rp5.813.997.000	Rp5.808.666.009	99,91%	63 Hari Operasi	63 Hari Operasi	100,00 %
3	QHD	Operasi Speedboat Pengawas	PN 07	Rp817.730.000	Rp810.615.487	99,13%	30 Hari Operasi	30 Hari Operasi	100,00 %
4	RAL	Speedboat Pengawas	PN 07	Rp4.257.640.000	Rp4.256.470.519	99,97%	1 Unit	1 Unit	100,00 %
5	RBQ	Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun	PN 07	Rp100.000.000	Rp99.991.575	99,99%	1 Unit	1 Unit	100,00 %
6	RCG	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	PN 07	Rp3.453.670.000	Rp3.452.145.613	99,96%	7 Unit	7 Unit	100,00 %
7	QIC	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	PN 06	Rp556.091.000	Rp555.162.154	99,83%	19 Lembaga	19 Lembaga	100,00 %
8	QIC	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	PN 06	Rp159.000.000	Rp158.480.144	99,67%	40 Lembaga	40 Lembaga	100,00 %
9	QIC	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	PN 01	Rp250.000.000	Rp249.545.860	99,82%	35 Lembaga	35 Lembaga	100,00 %
Jumlah				Rp15.508.128.000	Rp15.487.792.513	99,87%			

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Revisi Dipa	Tanggal	Nomor	Stamp	Nilai Anggaran
1	27 Desember 2022	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	4600-6589-2210-2284	26.996.725.000
2	14 Februari 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	4600-6589-2210-2284	26.996.725.000
3	21 Februari 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	3946-9011-0330-8030	26.996.725.000
4	06 April 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	3946-9011-0330-8030	26.996.725.000
5	05 Mei 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	3946-9011-0330-8030	26.996.725.000
6	19 Juli 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	3946-9011-0330-8030	26.996.725.000
7	29 Agustus 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	0291-6608-3476-7662	27.347.444.000
8	15 Oktober 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	9003-6711-7199-3082	25.765.529.000
9	19 Oktober 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	0932-4438-9282-0524	25.165.529.000
10	01 November 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	8430-3885-1641-9701	25.680.302.000
11	17 November 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	2690-1919-5107-2268	25.680.302.000
12	24 November 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	7160-1440-5777-0858	26.996.725.000
13	06 Desember 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	7160-1440-5777-0858	26.996.725.000
14	27 Desember 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	7160-1440-5777-0858	26.996.725.000

- Revisi ke 1 tanggal 27 Desember 2022 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan blokir anggaran (*Automatic Adjustment*) atau revisi halaman IV DIPA (Blokir).
- Revisi ke 2 tanggal 14 Februari 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

dengan melakukan perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) atau revisi halaman III DIPA (RPD).

- Revisi ke 3 tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan penghapusan tanda blokir anggaran dalam halaman IV DIPA (blokir pengadaan laptop) dengan pemenuhan dokumen pendukung kegiatan anggaran.
- Revisi ke 4 tanggal 06 April 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan melakukan perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) atau revisi halaman III DIPA (RPD).
- Revisi ke 5 tanggal 05 Mei 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan penyesuaian tagging *automatic adjustment* (AA) dalam catatan halaman IV DIPA (Blokir).
- Revisi ke 6 tanggal 19 Juli 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan pertukaran Blokir *automatic adjustment* (AA) dalam catatan halaman IV DIPA (Blokir).
- Revisi ke 7 tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan revisi ke Direktur Pelaksanaan Anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran belanja pegawai (51) dalam rangka pemenuhan belanja operasional pegawai.
- Revisi ke 8 tanggal 15 Oktober 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan penambahan anggaran Prioritas Nasional (PN), pergeseran anggaran antar-Satker, pembukaan blokir *automatic adjustment* (AA), dan pergeseran blokir anggaran Belanja Tambahan (ABT).
- Revisi ke 9 tanggal 19 Oktober 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan penghapusan blokir anggaran Double

automatic adjustment (AA), dan pergeseran blokir anggaran Belanja Tambahan (ABT).

- Revisi ke 10 tanggal 01 November 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan buka blokir ABT dan pergeseran anggaran antar KRO dalam satu program.
- Revisi ke 11 tanggal 17 November 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja.
- Revisi ke 12 tanggal 24 November 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja.
- Revisi ke 13 tanggal 06 Desember 2023 yang merupakan revisi Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Revisi ke 14 tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan revisi Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp3.088.510*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.088.510,- yang berasal dari Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan tahunan Docking Kapal Pengawas HIU 07 dengan No. NTPN 159A6555DF0E1DTC5, No. NTB 230914389410 Pada tanggal 14 September 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

URAIAN	REALISASI 31 DES 2022	REALISASI 31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Denda	3.088.510	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu		55.658.500	0,00
Pendapatan Lain-lain		-	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		9.225.555	
Jumlah	3.088.510	64.884.055	0,70

Per 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja

B.2 Belanja

Negara

Rp.25.583.370.144

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 25.583.370.144,- atau 99.62% dari anggaran belanja sebesar Rp. 25,680,302,000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

URAIAN	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	5.188.236.000	5.147.744.120	
Belanja Barang	15.438.563.000	15.383.677.651	
Belanja Modal	5.053.503.000	5.051.948.373	
Total Belanja (Netto)	25.680.302.000	25.583.370.144,	100
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja (Brutto)	25.680.302.000	25.583.370.144	100

Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember 2023 memiliki selisih sebesar 2% dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena belanja anggaran tahun 2023 lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.147.744.120	4.723.749.622	8,98
Belanja Barang	15.383.677.651	9.759.605.916	57,63
Belanja Modal	5.051.948.373	549.519.151	819,34
Total Belanja (Netto)	25.583.370.144	15.032.874.689	70,18
Pengembalian			
Jumlah	25.583.370.144	15.032.874.689	70,18

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp5.147.744.120,-*

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 5.147.744.120 dan Rp 4.723.749.622. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 8,98% dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh terdapat penambahan anggaran karena adanya CPNS.

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.719.404.980	1.696.045.340	1,38
Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.968	31.136	(3,75)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	139.020.260	139.518.110	(0,36)
Belanja Tunj. Anak PNS	44.295.408	40.370.216	9,72
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000	10.980.000	14,75
Belanja Tunj. Fungsional PNS	53.650.000	59.400.000	(9,68)
Belanja Tunj. PPh PNS	149.400	36.350	311,00
Belanja Tunj. Umum PNS	123.620.940	67.070.000	84,32
Belanja Tunj. Beras PNS	192.423.000	122.389.800	57,22
Belanja Uang Makan PNS	67.605.000	230.343.000	(70,65)
Belanja Uang Lembur	154.647.000	190.163.000	(18,68)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.214.605.759	2.167.405.202	2,18
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		-	
Belanja Gaji Pokok PPPK	137.115.000	-	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.350	-	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.261.750	-	
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.878.840	-	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.900.000	-	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.138.800	-	
Belanja Uang Makan PPPK	21.966.000	-	
Belanja Uang Lembur PPPK	29.415.000	-	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan /Kinerja PPPK	202.013.445	-	
Jumlah Belanja Bruto	5.147.744.900	4.723.752.154	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	780		-
Jumlah Belanja Netto	5.147.744.120	4.723.752.154	(97,38)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp15.383.677.651
,-

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.15.383.677.651,- dan Rp9.759.605.916,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami Kenaikan 63,4% Realisasi Belanja Barang TA

2022. Kenaikan belanja tersebut disebabkan anggaran pada tahun 2023 lebih Bedsar dari pada tahun 2022.

*Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	1.805.102.984	1.514.358.321	19,20
Belanja Barang Persediaan (5218)	211.756.135	236.124.687	-
Belanja Barang Non Operasional (5212)	6.492.031.352	4.011.980.656	-
Belanja Pemeliharaan (5231)	3.132.499.197	2.551.384.283	22,78
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	3.270.696.193	1.879.782.928	73,99
Belanja Jasa (5221)	474.461.790	667.873.104	-
Jumlah Belanja	15.386.547.651	10.861.503.979	41,66
Pengembalian Belanja	2.870.000	-	-
Total Belanja	15.383.677.651	10.861.503.979	41,63

- Belanja Barang Operasional Sebesar Rp. 1.805.102.984,- Merupakan pengeluaran anggaran yang meliputi kegiatan pembayaran Honor Pegawai non pemerintah, belanja honor operasional satuan kerja, belanja barang penambahan daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas, Belanja barang berupa pembayaran honor KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Dan Staf Pengelola Stasiun.
- Belanja Barang Non Operasional Sebesar Rp. 6.492.031.352,- .Bahan Merupakan Pengeluaran Anggaran yang meliputi kegiatan belanja barang Pengeluaran Anggaran yang meliputi kegiatan belanja barang seperti pembelian pelumas kapal, air tawar kapal, bahan bakar minyak operasi speedboat, air bersih speedboat, pelumas speedboat, penjilidan laporan speedboat, honor Output Kegiatan, Delegasi oprasional patroli dengan speedboat, uang makan

patroli dengan speedboat pembayaran uang jaga petugas keamanan tahanan, biaya cek kesehatan tahanan, biaya perpanjangan STNK motor, uang saku rapat dengan daerah.

- Belanja Barang Persediaan Sebesar Rp. 211.756.135,- Merupakan pengeluaran dari alat rumah tangga kantor, blanko keperluan kantor, air minum pegawai, alat kebersihan kantor, pembelian ATK, computer supplies, pembelian P3K, dan perawatan barang bukti awak kapal tersangka.
- Belanja Jasa Rp. 474.461.790,- Merupakan pengeluaran anggaran yang meliputi biaya langganan listrik untuk stasiun, satwas dan wilker; biaya langganan air untuk stasiun, satwas dan wilker; biaya sewa mobil dalam rangka docking kapal; dan honor narasumber dalam kegiatan penyusunan standar pelayanan.
- Belanja Pemeliharaan Rp. 3.132.499.197,- Merupakan pengeluaran anggaran yang meliputi docking kapal pengawas; perawatan rutin mesin kapal pengawas; perawatan darurat kapal pengawas; perawatan rutin speedboat; pemeliharaan gedung kantor; pemeliharaan bangunan mess operator; pemeliharaan pagar kantor; serta pemeliharaan komputer, laptop, AC, genset, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan printer.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp. 3.270.696.193,- Merupakan pengeluaran anggaran yang meliputi perjalanan dinas untuk pemantauan docking kapal; perjalanan dinas dalam rangka transport lokal, transport perjalanan dinas luar kota dan luar provinsi dalam kegiatan penyidikan, pengawasan

jenis ikan yang dilindungi, pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pengawasan usaha pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan ketaatan kapal perikanan, pengawasan kemitraan UPI dengan unit usaha penangkap ikan yang sesuai ketentuan, pengawasan penggunaan bahan tambahan berbahaya dalam produk hasil perikanan, pengawasan budidaya perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan, meeting pimpinan, konsultasi administrasi keuangan, konsultasi administrasi BMN.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp5.051.948.373,-

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.051.949.373,- dan Rp 549.519.151,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar 99,97% dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal tersebut disebabkan anggaran belanja modal tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.316.960.065	549.519.151	685,59
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	98.000.000	0	100,00
Belanja Modal Penambahan Peralatan dan Mesin	446.220.000	0	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	99.991.575	0	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	0	0	100,00
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00
Belanja Modal Jaringan	91.500.075	0	0,00
Jumlah Belanja	5.052.671.715	549.519.151	819,47
Pengembalian Belanja	723.342	0	-
Jumlah Belanja	5.051.948.373	549.519.151	819,34

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, hal tersebut disebabkan tidak dianggarkannya belanja modal tanah pada tahun anggaran 2023 dan 2022.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 2022 masing – masing sebesar Rp,4.316.960.065- dan Rp549.519.151,- yang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja modal peralatan dan mesin berupa:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	4.316.960.065	549.519.151	686%
Jumlah Belanja Kotor	4.316.960.065	549.519.151	686%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	4.316.960.065	549.519.151	686%

Rincian belanja modal peralatan dan mesin yaitu terdiri dari :

No	Nama Barang	Satuan	Harga
1	Kapal Pengawas Kelas VI tipe Speedboat	1 Unit	3.960.000.000
2	Tablet Samsung	2 Unit	13.999.275
3	Shredder Paper	2 Unit	11.000.000
4	Sofa	2 Unit	9.000.000
5	Lemari/Filling Cabinet	1 Unit	18.000.000
6	Kursi Staf	20 Unit	24.000.000
7	Ac Split	5 Unit	24.500.000
8	Meja 1 Biro	3 Unit	3.750.000
9	Rak Arsip	2 Unit	6.000.000
10	Handy Talkie	6 Unit	11.034.000
11	Apar	5 Unit	7.000.000
12	Springbed (Single Size)	1 Unit	5.350.000
13	Freezer (220 liter)	1 Unit	5.400.000
14	Lemari Baju	1 Unit	5.500.000
15	TV 43"	1 Unit	6.000.000
16	Kursi	5 Unit	3.500.000
Total			4.316.960.065

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 99.991.575,- dan Rp0,-, tahun 2023 terdapat belanja modal perencanaan Pembangunan Master Plan Pangkalan SDKP Kota Baru.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	99.991.575	0	100%
Jumlah Belanja Kotor	99.991.575	0	100%
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	99.991.575	0	100%

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp91.500.075 dan Rp0. Di tahun 2023 terdapat penambahan belanja modal berupa pemasangan Listrik Darat di Satwas SDKP Kota Baru,

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Irigasi	-	0	-
Belanja Modal Jaringan	91.500.075	0	100,00
Belanja Jalan dan Jembatan		-	
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	-	0	-
Jumlah Belanja Kotor	91.500.075	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	91.500.075	0	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Lainnya pada TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada TA 2023 dan 2022 tidak menganggarkan untuk belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Kas Pada BPP	-	-
Uang Muka	-	-
Kwitansi yang belum di SPM-kan	-	-
Sub Total I	-	-
LS Bendahara	-	-
Sub Total II	-	-
Jumlah (Sub Total I - II)	-	-
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca	-	-
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

<i>Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0</i>	Terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0.
<i>Piutang Bukan Pajak</i>	C.4 Piutang Bukan Pajak Piutang bukan pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.
<i>Bagian Lancar TPA Rp0</i>	C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0</i>	C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0,-.
<i>Beban Dibayar di Muka Rp0</i>	C.8 Beban Dibayar di Muka Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.
<i>Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0</i>	C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Persediaan

Rp67,237,025,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp, 67.23.025- dan Rp 331.964.523,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	42.106.415	55.354.400
Suku Cadang	25.130.610	276.610.123
Jumlah	67.237.025	331.964.523

Uraian	Nilai
Persediaan Habis Pakai Per 01 Januari 2023 (Saldo Awal 2023)	331.964.523
Realisasi Belanja 521811 31 Desember 2023	211.761.135
Realisasi Belanja 523123 31 Desember 2023	748.727.581
Koreksi Nilai Persediaan	0
Transfer dari POA	0
Total Realisasi 31 Desember 2022	960.488.716
Saldo Awal + Total Realisasi	1.292.453.239
Beban Persediaan Konsumsi	225.009.120
Beban Persediaan Suku Cadang	1.000.207.094
Total Beban	1.225.216.214
Selisih	67.237.025
Neraca 31 Desember 2022	67.237.025
Selisih	-

Rincian mutasi transaksi persediaan adalah sebagai berikut:

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2023	331.964.523
MUTASI TAMBAH	
TOTAL PEMBELIAN	960.488.716
KOREKSI PERSEDIAAN	0
TRANSFER MASUK	0
TOTAL MUTASI TAMBAH	960.488.716
MUTASI KURANG	
BEBAN PERSEDIAAN	1.225.216.214
TOTAL MUTASI KURANG	1.225.216.214
SALDO AKHIR PADA 31 DESEMBER 2023	67.237.025

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor B.2858/PSDKPSta.5/TU.210/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 Persediaan barang konsumsi sebesar Rp42.106.415,- terdiri dari alat tulis, penjepit kertas, buku tulis, ordner and map, penggaris, alat perekat, staples, isi staples, alat tulis kantor lainnya, kertas hvs, berbagai kertas, tinta/toner printer, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Pada berbagai kertas ada yang merupakan bahan cetak form pengawasan, HPK, dan SLO baik yang sudah terdistribusi maupun yang belum terdistribusi di seluruh Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Persediaan suku cadang sebesar 25.130.610 Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas KP. HIU 07 dan Speedboat yang terdapat pada kapal dengan rincian opname persediaan Tahunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	(KODE 117111)	JUMLAH	NO	(KODE 117111)	JUMLAH
1	Alat Tulis	1.392.250	11	berbagai kertas	36.749.400
2	Penjepit Kertas	215.000	12	tinta/toner printer	400.000
3	buku tulis	51.000	13	alat/bahan untuk kegiatan k	8.000
4	Ordner and map	1.738.200			
5	Penggaris	48.840			
6	Alat Perekat	130.925			
7	Staples	616.050			
8	Isi Staples	99.750			
9	Alat tulis kantor lainnya	332.000			
10	kertas hvs	325.000			
JUMLAH BARANG KONSUMSI					42.106.415

NO	(KODE 117131)	JUMLAH
1	Zink Elektroda Part 823661 (Hiu)	7.009.712
2	Zink Anode Part 838929 (Hiu)	3.389.218
3	Belt, Fan (Hiu)	1.980.000
4	Air Filter (Sucad Hiu)	3.885.000
5	Nozzle 866546 (SUSucad Hiu)	8.866.680
BAHAN BAKU		25.130.610

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp.0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

*Penyisihan
Piutang tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

*Tanah
Rp4.070.616.000,-*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.070.616.000,- dan Rp4.070.616.000,- Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.070.616.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset	
Transfer Masuk	
Mutasi Tambah: Hibah Masuk	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	4.070.616.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4.070.616.000

Tidak ada pembelian maupun penambahan tanah pada stasiun PSDKP Tarakan.

Rincian Tanah Per Tanggal 31 Desember 2023

Lokasi Tanah	Kuantitas (m2)	Nilai Tanah
Tarakan	420	1,720,992,000
BalikPapan	256	890,624,000
Tarakan Barat	987	1,356,500,000
Tanjung Batu Kab. Berau	2,500	102,500,000

Semua aset tanah digunakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan sebagai penunjang kegiatan di Satwas dan Wilker PSDKP yang merupakan wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan.

Peralatan dan Mesin

Rp.23.577.689.33

3

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 23.577.689.333 ,- dan Rp. 18.723.345.610,- Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 446,220,000,-. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	18.807.871.935
Mutasi tambah:	5.057.069.403
Pembelian	446,220,000
Pengembangan Nilai Aset	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Tambah: Koreksi Pencatatan Nilai tambah	
Penghentian dari penggunaan	-
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	-
Saldo per 31 Desember 2023	23.864.941.338
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	16.144.073.469
Nilai Buku per 31 Desember 2023	10.599.904.600

Penambahan asset dari pembelian sebesar Rp. 446,220,000,- dengan rincian yang telah dijelaskan pada belanja peralatan dan mesin.

Aset diatas bernilai Rp. 18.807.871.935,- terdiri dari Aset intrakompetible senilai 5.053.569.403,- dan asset ekstrakompetible senilai Rp. 3.500.000,-.

PERALATAN DAN MESIN		satuan	730	18.807.871.935	37	549.519.151	730	18.807.871.935
1	ALAT BANTU	Unit	5	125.980.000	0	341.800.000	5	125.980.000
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	20	2.211.977.860	1	0	20	2.211.977.860
3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Unit	7	12.335.100.288	0	0	7	12.335.100.288
4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK	Unit	1	80.300.000	0	0	1	80.300.000
5	ALAT BENGKEL BERMESIN	Buah	2	7.975.000	0	0	2	7.975.000
6	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Buah	17	30.716.260	0	0	17	30.716.260
7	ALAT UKUR	Buah	10	51.163.200	0	0	10	51.163.200
8	ALAT PENGOLAHAN	Buah	5	16.500.000	0	6.465.800	5	16.500.000
9	ALAT KANTOR	Buah	73	681.521.700	2	54.720.692	73	681.521.700
10	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	344	911.072.472	15	8.439.330	344	911.072.472
11	ALAT STUDIO	Buah	31	239.391.290	2	0	31	239.391.290
12	ALAT KOMUNIKASI	Buah	27	196.129.000	0	0	27	196.129.000
13	PERALATAN PEMANCAR	Buah	4	281.400.000	0	0	4	281.400.000
14	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	10	3.077.000	0	0	10	3.077.000
15	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Buah	5	9.855.000	0	4.235.338	5	9.855.000
16	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN	Buah	1	4.235.338	1	0	1	4.235.338
17	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Buah	15	86.150.000	0	0	15	86.150.000
18	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	5	32.500.000	0	0	5	32.500.000
19	KOMPUTER UNIT	Buah	73	740.943.231	7	92.827.591	73	740.943.231
20	PERALATAN KOMPUTER	Buah	57	176.334.896	3	12.987.000	57	176.334.896
21	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Buah	1	4.191.000	0	0	1	4.191.000
22	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Buah	1	17.820.000	0	0	1	17.820.000
23	ALAT SAR	Buah	4	102.795.000	0	0	4	102.795.000
24	ALAT KERJA PENERBANGAN	Buah	10	448.423.400	6	28.043.400	10	448.423.400
25	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	2	12.320.000	0	0	2	12.320.000

Gedung dan Bangunan Rp.10.599.904.600,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.10.599.904.600.- dan Rp.10.599.904.600.- Mutasi transaksi sebesar Rp0 terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.599.904.600
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	10.599.904.600
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	10.599.904.600

Rincian Nilai Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

No	Nama	Luas	Nilai
1	Kantor Satwas Balikpapan	52 m2	523,555,000
2	Kantor Utama Stasiun PSDKP Tarakan	309 m2	3,069,512,600
3	Kantor Satwas Sebatik	64 m2	116,922,000
4	Kanopi Kantor PSDKP Tarakan	114 m2	157,534,200
5	Mess Operator Satwas Balikpapan	33 m2	225,668,000
6	Kantor Wilker PSDKP Batulicin	54 m2	218,430,000
7	Mess Operator Stasiun PSDKP Tarakan	56 m2	494,120,500
8	Kantor Satwas PSDKP Tarakan	102 m2	795,020,000
9	Kantor Satwas PSDKP Kotabaru	60 m2	160,527,000
10	Gedung Pos Jaga Kantor	4 m2	155,542,400
11	Kantor Satwas SDKP Nunukan	240m2	2,247,218,500
12	Tempat Penampungan Sementara ABK TPKP	103.55M2	1,377,032,000
13	Pagar Samping Kantor Tarakan		369,630,000
14	Pagar Kantor Balikpapan		221,329,000
15	Pagar Kantor Tarakan		70,067,078
16	Pagar Keliling Balikpapan		180,799,400
17	Halaman Kantor Stasiun PSDKP Tarakan		216,996,922
Total			10,599,904,600

Tidak terdapat mutasi aset untuk gedung dan bangunan

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp.
906,462,570,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 906.462.570.- dan Rp 814.962.495.- Mutasi transaksi terhadap Jalan. Irigasi. dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	814.962.495
Mutasi tambah: Pengembangan melalui KDP Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Penyelesaian Pembangunan Langsung Mutasi kurang: Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Koreksi Semua Hasil Penilaian Kembali	91.500.075
Saldo per 31 Desember 2023	91.500.075
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	906.462.570

Rincian Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut

No	Nama	Nilai
1	Paving Block Balikpapan	94.564.700
2	Jalan Akses kantor PSDKP Tarakan	85.394.895
3	Paving Block Kantor Tarakan	175.903.000
4	Jembatan Pos Sebatik	58.173.000
5	Jembatan Akses Batulicin	246.251.900
6	Jalan Akses kantor Stasiun PSDKP Tarakan	149.675.000
7	Jaringan Listrik Sebatik	5.000.000
8	Pemasangan Listrik Darat	91.500.075
Total		906.462.570

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,- dan Rp 0,- .

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp176,632,575,*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.176,632,575,- dan Rp.76.641.00,-

Rincian KDP yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna dengan nomor kontrak 1205/Sta.5/PL.421/I/2022 tanggal 15 Januari 2022

sebesar Rp80.000.000 dan jangka waktu pengerjaan 30 hari oleh CV. INDOTEC NUSANTARA dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp68.000.000 melalui SPM nomor 0050T/355105/2022 tanggal 02 Maret 2022 dan SP2D 200481303000539 tanggal 2 Maret 2022.

- Masterplan pos pengawasan SDKP Kota Baru yang telah dibayarkan 100% dari nilai kontrak sebesar Rp99.991.575 sesuai dengan SPK Nomor : B.2438/PSDKPSta.5/PL.421/XI/2023 tanggal 13 November 2023. Dengan Nomor SPM 01008T/355105/2023 dengan total pembayaran Rp. 99.991.750 Nomor SP2D 230481302006452 tanggal 19 Desember 2023 dengan pengerjaan selama 35 hari oleh PT. PADURAKSA KONSULTAN.

No	Jenis KDP	Volume	Lokasi	Kontraktor	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai KDP
1	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna	1 Paket	Tarakan	CV. Indotec Nusantara	00205/Sta.5.PL.421/I/2020	15-01-2020	80.000.000	68.000.000
2	Administrasi Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna	1 Paket	Tarakan				0	8.641.000
3	Masterplan Pos Pangkalan SDKP Kotabaru	1 Paket	Kotabaru	PT. PADURAKSA KONSULTAN	B.2438/PSDKPSta.5/PL.421/XI/2023	13/11/2023	99.991.755	99.991.755
Jumlah								176.632.755

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp 17,433,419,459)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing – masing Rp(17.433.419.459) dan Rp(16.697.178.136). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas

nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp(17.433.419.459). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	23,577,689,333	16,144,073,469
2	Gedung dan Bangunan	10,599,904,600	935,401,642
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	906,462,570	353,944,348
4	Aset Tetap Lainnya		
Akumulasi Penyusutan		35.084.056.503	17.433.419.459

Aset Tak Berwujud Rp0,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp 0,-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp 0,-

C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah (Rp.0,-) dan (Rp319.901.882,-) .

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar,- Rp. 0,- dan Rp 0,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 14.917.446,-*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar,- Rp. 14.917.446,- dan Rp. 15.790.535,-

Terdiri dari pembayaran air bulan desember 2023 sebesar Rp.1.566.339,- pembayaran Telepon bulan desember 2023 sebesar Rp.5.411.657,- pembayaran Listrik bulan desember 2022 Sebesar Rp. 7.939.150,- yang dibayarkan di tahun anggaran 2023.

Unit	Nomor Tagihan	Jenis Tagihan	TOTAL TAGIHAN
Stasiun PSDKP Tarakan	0162501328329	Internet	Rp1.563.250,00
	251000443027	Listrik Kantor	Rp5.928.864,00
	235000016520	Listrik Mess	Rp2.010.286,00
	08115372807	halo	Rp114.000,00
	08115372808	Halo	Rp114.000,00
	08115372809	Halo	Rp114.000,00
	0123709	PDAM Kantor	Rp785.050,00
	0119571	PDAM Mess	Rp568.720,00
Satwas Nunukan	162505206974	Internet	Rp431.350,00
Wilker Nunukan Utara	162505209214	Internet	Rp386.950,00
Satwas Balikpapan	0542-000740240	Internet	Rp686.650,00
	1030230333	PDAM	Rp212.569,00
Satwas Kotabaru	162223204278	Internet	Rp764.350,00
Satwas Banjarmasin	161203228696	Internet	Rp386.950,00
	0511-004411751	Internet	Rp463.207,00
Wilker Muara Kintap	161203231359	Internet	Rp386.950,00
		TOTAL	14.917.146

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp0.000*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. masing-masing nilainya Rp.5.000, dan Rp. 0, Nilai beban tersebut berupa belanja ATK kantor Stasiun PSDKP Tarakan yang double penginputan pada akun Komitmen.

*Ekuitas
Rp21.965.071.6
44*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.965.071.644,- dan Rp17.904.465.557,- Ekuitas adalah kekayaan bersih

entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp 3.088.510*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 3.088.510. Dan Rp. 54.422.500 Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Anggaran Lain	3.088.510	54.422.500	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	3.088.510	54.422.500	0,00

PNBP di tahun 2023 terdapat Nilai Rp. 3.088.510 adalah Pendapatan dari denda keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 3.088.510 pada SPM 00355 dan nomor SP2D 23048130200304 atas keterlambatan pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan (Docking Kapal Pengawas HIU 07).

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.147.744.120,- dan Rp. 4.723.749.622,-

Beban Pegawai Rp5.147.744.120

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	1.719.404.980	1.696.045.340	1,38
Beban Pembulatan Gaji	29.188	28.604	2,04
Beban Tunjangan Suami/ Istri PNS	139.020.260	139.518.110	- 0,36
Beban Tunjangan Anak PNS	44.295.408	40.370.216	9,72
Beban Tunjangan Struktural	12.600.000	10.980.000	14,75
Beban Tunjangan Fungsional	53.650.000	59.400.000	- 9,68
Beban Tunjangan PPh PNS	149.400	36.350	311,00
Beban Uang Beras PNS	123.620.940	122.389.800	1,01
Beban Uang Makan	192.423.000	230.343.000	- 16,46
Beban Tunjangan Umum PNS	67.605.000	67.070.000	0,80
Beban Uang Lembur		190.163.000	- 27,90
Beban Tunjangan Kinerja		2.167.405.202	- 100,00
Beban Gaji Pokok PPPK	137.115.000	-	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.350	-	
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.261.750	-	
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.878.840	-	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12.900.000	-	
Beban Tunjangan Beras PPPK	10.138.800		
Beban Uang Makan PPPK	21.966.000		
Beban Uang Lembur	154.647.000		
Beban Uang Lembur PPPK	29.415.000		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.214.605.759		
PPPK	202.013.445		
Jumlah Beban Pegawai (LO)	5.147.744.120	4.723.749.622	8,98
Gaji Tahun Yang Lalu	-	-	-
Uang Makan Tahun Yang Lalu	-	-	-
Pengembalian Pembulatan Gaji	-	2.532	#VALUE!
Pengembalian Tunjangan Umum	-	-	-

*Beban
Persediaan
Rp224.953.120,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.224.953.120,- dan Rp.260.721.539,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	224.953.120	260.721.539	(13,72)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	224.953.120	260.721.539	(13,72)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp8.767.903.737,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.767.903.737,- dan Rp6.050.455.615,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.534.465.242	1.324.983.667	15,81
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	105.377.902	80.923.537	30,22
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.086.699	19.890.750	-4,04
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	141.150.000	130.720.000	7,98
Beban Operasional Penanganan Pandemi Covid	-	2.393.590	0,00
Belanja Bahan	5.630.649.725	3.416.197.522	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	66.600.000	92.560.000	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	791.281.627	502.058.600	57,61
Beban Langganan Listrik	112.170.230	136.414.454	-17,77
Beban Langganan Telpon	95.635.401	86.863.798	10,10
Beban Langganan Air	32.348.259	38.319.097	-15,58
Beban Sewa	133.020.000	124.600.000	6,76
Beban Jasa Profesi	13.400.000	14.200.000	-5,63
Beban Jasa Lainnya	87.887.900	73.405.600	19,73
Beban Jasa-penanganan Pandemi Covid-19	-	6.925.000	0,00
Beban Aset Ekstrakonpetible Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO)	8.767.903.737	6.050.455.615	44,91
Pembayaran Beban Tahun Lalu	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Beban Aset Ekstrakonpetible Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban yang belum dibayar	-	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa (NERACA)	8.767.903.737	6.050.455.615	44,91

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
3.383.978.710*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.383.978.710,- dan Rp 1.829.582.308,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	310.421.189	104.436.830	66,36
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.073.350.427	1.535.504.242	25,94
Beban Pemeliharaan Irigasi	0	0	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	748.727.581	240.240.070	67,91
Jumlah	3.132.499.197	1.880.181.142	66,61

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp 3.270.696.193,-

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar dan Rp3.270.696.193,- dan Rp1.633.126.244,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.751.480.587	1.178.813.423	57,16
Beban Perjalanan Tetap	0	0	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	114.300.000	208.349.000	-82,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.241.000	73.203.780	-10,51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	338.674.606	172.760.041	-160,81
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO)	3.270.696.193	1.633.126.244	50,07

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp0 Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 748.592.788,- Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,748.592.788,- dan Rp.1.761.066.912,- Beban Penyusutans merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatus aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	612.695.229	1.489.251.920	-58,86
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	107.449.293	214.898.586	-50,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	20.902.016	41.804.031	-50,00
Beban Penyusutan Irigasi	7.483.750	14.967.500	-50,00
Beban Penyusutan Jaringan	62.500	125.000	-50,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	19.875	19.875	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	748.612.663	1.761.066.912	

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0,- dan Rp. 0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp64.844.305*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.64.844.305,- Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:.

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-39.750	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		9.225.555	
Jumlah Pelepasan Aset Non Lancar	0	9.185.805	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	0	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0		
Pedapatan dari kegiatan non operasional lainnya	-	55.658.500	-100,00
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	55.658.500	-100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	64.844.305	-100,00

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017.*

D.13 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.730.692.789, - dan Rp.16.702.795.325 ,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(21.450,381,159),- dan Rp(16.120.654.155), Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0,- dan Rp.130.628.489,-. Koreksi Nilai Persediaan karena adanya penambahan saldo awal atas pemeriksaan dari Inspektorat berupa Suku Cadang Kapal Pengawas Tahun 2021.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0,-*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas pencatatan klasifikasi BMN pada periode sebelumnya. Koreksi atas reklasifikasi periode 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp4.762.498,-*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2023, merupakan Perubahan pencatatan pada aplikasi Sakti modul Aset Tetap yaitu koreksi pencatatan perubahan kode barang dan nama barang terhadap aset dengan rincian sebagai berikut;

No.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	KET
1	3010303002	Portable Compressor	1	2017	4.700.000	Kesalahan Kodifikasi
2	3010305010	Pompa Air	1	2018	66.220.000	Kesalahan Kodifikasi
3	3010305999	Pompa Lainnya	1	2009	25.000.000	Kesalahan Kodifikasi
4	3010305999	Pompa Lainnya	2	2009	25.000.000	Kesalahan Kodifikasi
5	3010305999	Pompa Lainnya	3	2018	5.060.000	Kesalahan Kodifikasi
6	3080605036	Refrigerator/Freezer	1	2021	4.235.338	Kesalahan Kodifikasi
7	3090407035	Fingerprint Camera	1	2017	6.500.000	Kesalahan Kodifikasi
8	3090407035	Fingerprint Camera	2	2017	6.500.000	Kesalahan Kodifikasi
9	3090407035	Fingerprint Camera	3	2017	6.500.000	Kesalahan Kodifikasi
10	3090407035	Fingerprint Camera	4	2017	6.500.000	Kesalahan Kodifikasi
11	3090407035	Fingerprint Camera	5	2017	6.500.000	Kesalahan Kodifikasi
12	3110101001	Teropong	1	2009	4.191.000	Kesalahan Kodifikasi
				JUMLAH	166.906.338	

Kemudian Aset Tersebut di Koreksi dengan rincian sebagai berikut:

No.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	KET
1	3150303017	Compressor udara	1	2017	4.700.000	Reklasifikasi Barang
2	3170119004	Jet Pump	1	2018	66.220.000	Reklasifikasi Barang
3	3170119004	Jet Pump	1	2009	25.000.000	Reklasifikasi Barang
4	3170119004	Jet Pump	2	2009	25.000.000	Reklasifikasi Barang
5	3170119004	Jet Pump	3	2018	5.060.000	Reklasifikasi Barang
6	3050204001	Lemari es	1	2021	4.235.338	Reklasifikasi Barang
7	3050105017	Mesin Absensi	1	2017	6.500.000	Reklasifikasi Barang
8	3050105017	Mesin Absensi	2	2017	6.500.000	Reklasifikasi Barang
9	3050105017	Mesin Absensi	3	2017	6.500.000	Reklasifikasi Barang
10	3050105017	Mesin Absensi	4	2017	6.500.000	Reklasifikasi Barang
11	3050105017	Mesin Absensi	5	2017	6.500.000	Reklasifikasi Barang
12	3060105038	Teropong/Keker	1	2009	4.191.000	Reklasifikasi Barang
				JUMLAH	166.906.338	

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp0 Tidak ada koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi

atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp. 25,581,034,259, -

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar,- Rp. 25.581.034.259 dan Rp15.163.708.434,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	3,088,510
Ditagihkan ke Entitas Lain	25.581.034.259
Transfer Masuk	8,198,250
Transfer Keluar	7,445,625
Pengesahan Hibah Langsung	
Jumlah	25.581.034.259

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 dan 2022, DKEL sebesar Rp25.581.034.259,- dan Rp15.163.708.434,- sedangkan DDEL sebesar Rp(3.088.510-) dan (64.884.055,-).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal

KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 8,198,250. Sedangkan transfer masuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.217.800. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 7,445,625 sedangkan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

Transfer masuk senilai Rp. 8,198,250,- merupakan transfer masuk Peralatan dan Mesin senilai 17.713.000 dan dari akumulasi Peralatan dan Mesin senilai (9.514.750) Rincian Dan nilai Transfer Keluar sebesar 7,445,652 berupa nilai Peralatan dan Mesin Sebesar 28.362.000 dan dari nilai Akumulasi Peralatan dan Mesin senilai (16.380.375) sehinggann tercatat Nilai Transfer Keluar sebsesar 7.445.625.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp21.950.154.
498,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 21,950,154,498,- dan Rp17.904.465.557,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 31 Desember 2023 pada Stasiun PSDKP Tarakan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pejabat pengelola keuangan Stasiun PSDKP Tarakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 14/MEN/KU.611/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan dengan rincian sebagai berikut;

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Johanis J Medea, S.St.Pi

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor B. 44/PSDKPSta.5/KU.110/I/2023, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan dengan rincian sebagai berikut;

1. Pejabat Pembuat Komitmen : Johanis J Medea

2. Pejabat PPSM : Abdul Haris, S.St.Pi

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.00356/Sta.05/KU.611/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara Pengeluaran : Sarima

- Terhitung Surat Penugasan Mulai dari Tahun 2021 s/d Juli 2023

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Nomor: B.1480/PSDKPSta.5/KU.110/VII/2023 Tentang Perubahan Perubahan Pertama Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Stasiun PSDKP Tarakan dengan Rincian sebagai berikut:

- Nama : Sarima

- Terhitung Mulai Penugasan : 01 Agustus 2023

3. Pelaksanaan revisi sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 14 (Tujuh) kali yaitu:

Revisi Dipa	Tanggal	Nomor	Stamp	Nilai Anggaran
1	27 Desember 2022	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	4600-6589-2210-2284	26.996.725.000
2	14 Februari 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	4600-6589-2210-2284	26.996.725.000
3	21 Februari 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	3946-9011-0330-8030	26.996.725.000
4	06 April 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	3946-9011-0330-8030	26.996.725.000
5	05 Mei 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	3946-9011-0330-8030	26.996.725.000
6	19 Juli 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	3946-9011-0330-8030	26.996.725.000
7	29 Agustus 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	0291-6608-3476-7662	27.347.444.000
8	15 Oktober 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	9003-6711-7199-3082	25.765.529.000
9	19 Oktober 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	0932-4438-9282-0524	25.165.529.000
10	01 November 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	8430-3885-1641-9701	25.680.302.000
11	17 November 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	2690-1919-5107-2268	25.680.302.000
12	24 November 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	7160-1440-5777-0858	26.996.725.000
13	06 Desember 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	7160-1440-5777-0858	26.996.725.000
14	27 Desember 2023	SP DIPA-032.05.2.355105/2023	7160-1440-5777-0858	26.996.725.000

- Revisi ke 1 tanggal 27 Desember 2022 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan blokir anggaran (*Automatic Adjustment*) atau revisi halaman IV DIPA (Blokir).
- Revisi ke 2 tanggal 14 Februari 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan melakukan perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) atau revisi halaman III DIPA (RPD).
- Revisi ke 3 tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan penghapusan tanda blokir anggaran

dalam halaman IV DIPA (blokir pengadaan laptop) dengan pemenuhan dokumen pendukung kegiatan anggaran.

- Revisi ke 4 tanggal 06 April 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan melakukan perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) atau revisi halaman III DIPA (RPD).
- Revisi ke 5 tanggal 05 Mei 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan penyesuaian tagging *automatic adjustment* (AA) dalam catatan halaman IV DIPA (Blokir).
- Revisi ke 6 tanggal 19 Juli 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan pertukaran Blokir *automatic adjustment* (AA) dalam catatan halaman IV DIPA (Blokir).
- Revisi ke 7 tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan revisi ke Direktur Pelaksanaan Anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran belanja pegawai (51) dalam rangka pemenuhan belanja operasional pegawai.
- Revisi ke 8 tanggal 15 Oktober 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan penambahan anggaran Prioritas Nasional (PN), pergeseran anggaran antar-Satker, pembukaan blokir *automatic adjustment* (AA), dan pergeseran blokir anggaran Belanja Tambahan (ABT).
- Revisi ke 9 tanggal 19 Oktober 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan penghapusan blokir anggaran Double *automatic adjustment* (AA), dan pergeseran blokir anggaran Belanja Tambahan (ABT).
- Revisi ke 10 tanggal 01 November 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melakukan buka blokir ABT dan pergeseran anggaran antar KRO dalam satu program.
- Revisi ke 11 tanggal 17 November 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja.
- Revisi ke 12 tanggal 24 November 2023 yang merupakan revisi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja.

- Revisi ke 13 tanggal 06 Desember 2023 yang merupakan revisi Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
 - Revisi ke 14 tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan revisi Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
3. Adanya Jurnal Khusus disebabkan karena masih adanya beban yang masih harus dibayarkan.
- a. Adanya Jurnal manual dengan uraian saldo akun tidak normal yang di koreksi menjadi akun Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi kode Akun (391116) dengan nilai 732.432, saldo ini berasal dari pengembalian Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Pengawas Klas VI Tipe Speedboat, dengan Nilai Kontrak 98.000.000 Dengan Nomor kontrak B.2363/PSDKPSta.5/PL.421/XI/2023 Tanggal 2 November 2023. Dimana nilai pengembalian tersebut merupakan nilai sisa perjalanan Penyedia dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Stasiun PSDKP Tarakan. Perjalanan Tersebut di anggarkan sebesar 8.300.000 untuk 2 OK yang masing- masing Ok sebesar 4.150.000 dan terdapat potensi kelebihan sebesar 732.432.
4. Terdapat Belanja Barang/ Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait BMN dan Persediaan ke sesditjen PSDKP di Jakarta Pada tanggal 21-22 dan 27-29 Desember 2023 Sebesar 5.154.853. an. Pelaku Perjalanan Dinas An. Arman Somantri, S.St.Pi
5. Terdapat Belanja barang yang masih harus di bayarkan pada Kegiatan Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di kota baru Kalimantan Selatan. Dengan keterangan kasus perkara pidana Kapal Perikanan Indonesia menggunakan alat tangkap cantrang. 2. Pasal pelanggaran Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Jo Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Berkas perkara telah lengkap P21 (tahap I) pada 8 - 15 Januari 2024 dan dilakukan serah terima tanggungjawab tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Kota Baru.

Sidang perdana dan putusan telah di laksanakan pada 30 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Kota Baru.

No	Uraian (Lengkap dengan Tanggal Nota/Kegiatan)	Rincian Nama Barang	Jumlah Item x Harga Satuan	Jumlah	Total
a	r	s	t	u	
1	HJ. Wangi, Biaya konsumsi dalam rangka rapat/pemberkasan perkara TPKP kasus kategori sedang Tanggal 22 Desember 2023 (18-22 Desember 2023)	Nasi Kota (Nasi+Ikan Bakar+Sayur+Sambal)	8 Orang X 5 Hari x 1 Kali Makan x 45.000	Rp1.800.000,00	1.800.000
2	HJ. Wangi, Biaya konsumsi dalam rangka rapat/pemberkasan perkara TPKP kasus kategori sedang Tanggal 27 Desember 2023 (23-27 Desember 2023)	Nasi Kota (Nasi+Ikan Bakar+Sayur+Sambal)	8 Orang X 5 Hari x 1 Kali Makan x 45.000	Rp1.800.000,00	1.800.000
3	HJ. Wangi, Biaya konsumsi administrasi penyidikan Tanggal 31 Desember 2023 (28-31 Desember 2023)	Nasi Kota (Nasi+Ikan Bakar+Sayur+Sambal)	8 Orang X 4 Hari X 1 Kali Makan x 45.000	Rp1.440.000,00	1.440.000
4	TOYS CITY, Belanja ATK Pemberkasan Perkara TPKP Stasiun PSDKP Tarakan pada Tanggal 19 Desember 2023	1. K. F/C 70 GR A4 BDU 2. K. F/C 70 GR A4 BDU 3. MAP BIOLA 5002 BIRU 4. PAPER CLIP 5 5. BALLPOINT STANDART AE7 6. SPIDOL SNOWMAN WHITE BOARD HITAM 7. TIPE EX RETYPE 8. KENKO BINDER CLIP NO.105 9. BINDER CLIP JOYKO NO 200 10. PAPER CLIP JOYKO NO.3 11. ISI CUTTER BESAR	5 x 40.000 5 x 40.000 2 x 55.000 2 x 36.000 4 x 17.000 3 x 10.000 5 x 20.000 10 x 3.500 10 x 11.000 10 x 1.500 2 x 30.000	Rp1.000.000,00	1.000.000
5	DNA COMPUTER, Belanja Bahan Komputer Pemberkasan Perkara TPKP Stasiun PSDKP Tarakan pada Tanggal 19 Desember 2023	1. INK BOTTLE EPSON T6641 BLACK 2. INK BOTTLE EPSON T6642 CYAN 3. INK BOTTLE EPSON T6643 MAGENTA 4. INK BOTTLE EPSON T6644 YELLOW 5. RIBBON CARTRIDGE	8 X 85.000 4 X 85.000 4 X 85.000 4 X 85.000 4 X 75.000	Rp2.000.000,00	2.000.000
6	Warung IBU NISA, Belanja Biaya Makan Calon Tersangka Tanggal 18 Desember	1. Nasi Kotak (Rames Ayam Bakar Dada+Tahu+Tempe+Sayur+Perkedal+Sambe	2 Orang X 1 Hari X 3 Kali Makan x 40.000	Rp240.000,00	240.000
7	Warung IBU NISA, Belanja Biaya Makan Tersangka Tanggal 23 Desember 2023 (18-23 Desember 2023)	1. Nasi Kotak (Rames Ayam Bakar Dada+Tahu+Tempe+Sayur+Perkedal+Sambe l)	2 Orang X 6 Hari X 3 Kali Makan x 40.000	Rp1.440.000,00	1.440.000

Link Gdrive Pertanggungjawaban

8	Warung IBU NISA, Belanja Biaya Makan Tersangka Tanggal 30 Desember 2023 (24-30 Desember 2023)	1. Nasi Kotak (Rames Ayam Bakar Dada+Tahu+Tempe+Sayur+Perkedal+Sambel)	2 Orang X 7 Hari X 3 Kali Makan x 40.000	1.680.000
9	Warung IBU NISA, Belanja Biaya Makan Tersangka Tanggal 31 Desember 2023	1. Nasi Kotak (Rames Ayam Bakar Dada+Tahu+Tempe+Sayur+Perkedal+Sambel)	2 Orang X 1 Hari X 3 Kali Makan x 40.000	240.000
10	Warung IBU NISA, Belanja Biaya Makan Non Justitia Tanggal 21 Desember 2023 (18-21 Desember 2023)	1. Nasi Kotak (Rames Ayam Bakar Dada+Tahu+Tempe+Sayur+Perkedal+Sambel)	4 Orang X 4 Hari X 3 Kali Makan x 40.000	1.920.000
11	Warung IBU NISA, Belanja Biaya Makan Non Justitia Tanggal 25 Desember 2023 (22-25 Desember 2023)	1. Nasi Kotak (Rames Ayam Bakar Dada+Tahu+Tempe+Sayur+Perkedal+Sambel)	4 Orang X 4 Hari X 3 Kali Makan x 40.000	1.920.000
12	Warung IBU NISA, Belanja Biaya Makan Non Justitia Tanggal 29 Desember 2023 (26-29 Desember 2023)	1. Nasi Kotak (Rames Ayam Bakar Dada+Tahu+Tempe+Sayur+Perkedal+Sambel)	4 Orang X 4 Hari X 3 Kali Makan x 40.000	1.920.000
13	Warung IBU NISA, Belanja Biaya Makan Non Justitia Tanggal 31 Desember 2023 (30-31 Desember 2023)	1. Nasi Kotak (Rames Ayam Bakar Dada+Tahu+Tempe+Sayur+Perkedal+Sambel)	4 Orang X 2 Hari X 3 Kali Makan x 40.000	960.000
14	TOKO HJ. EVO, Belanja Penyediaan Keperluan Awak Kapal TPKP, 18 Desember 2023	1. Sampo 300 ml 2. Sabun Cair 825 ml 3. Pasta Gigi 225 G 4. Baju Kaos 5. Celana Pendek 6. Sandal 7. Handuk	6 X 45.000 5 X 30.000 4 X 27.000 2 X 80.000 2 X 56.000 2 X 60.000 2 X 40.000	1.000.000
15	Abdul Haris, S.St.Pi, Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka perkara TPKP kasus kategori sedang, Tanggal 19-29 Desember 2023	Abdul Haris, S.St.Pi	Transport Laut : 238.000 Transport Darat : 1.244.000 Uang Harian : 2.260.000 Penginapan : 1.252.000	4.994.000
16	Robi Junanto, S.St.Pi, Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka perkara TPKP kasus kategori sedang, Tanggal 19-29 Desember 2023	Robi Junanto, S.St.Pi	Uang Harian : 2.260.000	2.260.000
17	Abdul Haris, S.St.Pi, Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka perkara TPKP kasus kategori sedang, Tanggal 19-29 Desember 2023	Muhammad Syamsul Hadi	Uang Harian : 2.260.000 Penginapan : 1.252.000	3.512.000

6. Realisasi BBM Kapal Pengawas Hiu 07 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 4,411,333,000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 4,411,333,000. Berdasarkan Berita Acara Sisa BBM Kapal Pengawas Hiu 07 nomor 0812 /Sta.5/HIU07/PW.450/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 sisa BBM sebanyak 2.000 liter.